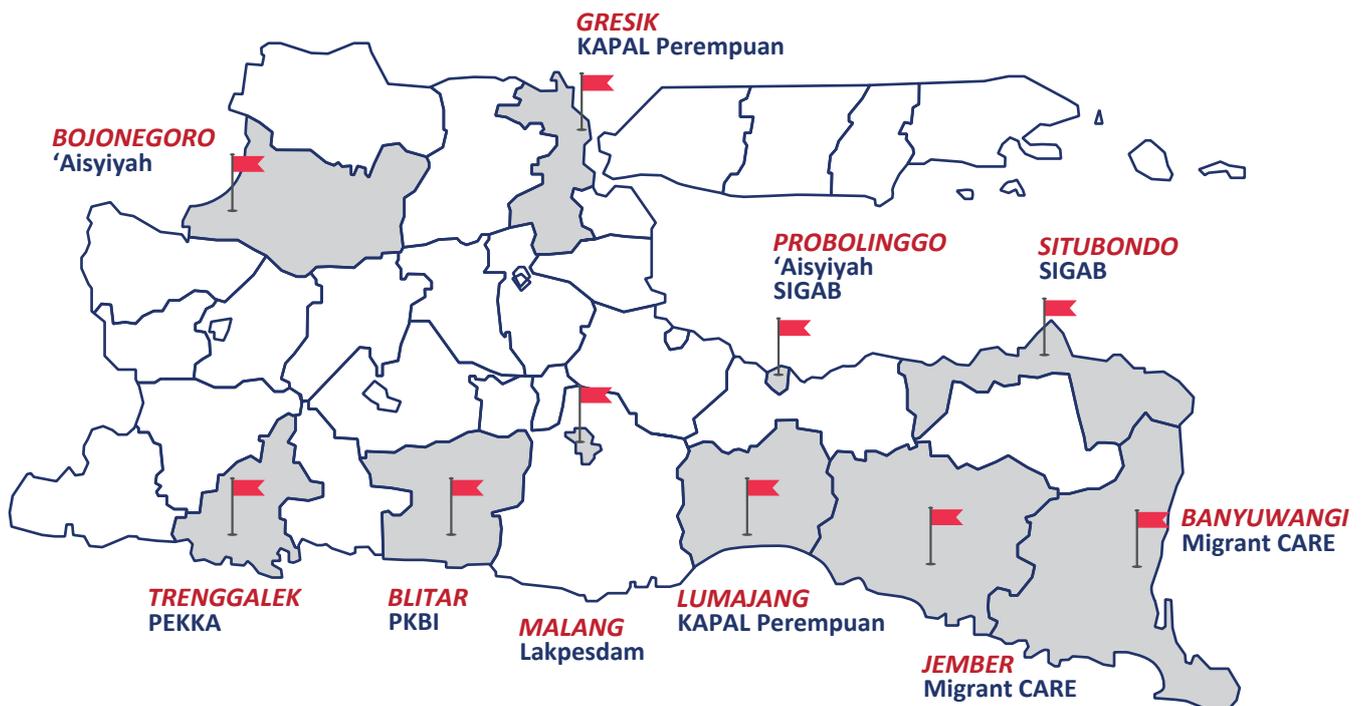


INKLUSI di Jawa Timur

NO-ONE IS LEFT BEHIND

INKLUSI bekerja sama dengan 7 organisasi masyarakat sipil dan jaringannya di Jawa Timur, yaitu 'Aisyiyah, Institut KAPAL Perempuan (Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan), Lakpesdam (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), Migrant CARE, PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga), PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), dan SIGAB (Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel), untuk memajukan kerja-kerja mereka, yang bertujuan memastikan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan, berpartisipasi di dalam pembangunan, terlindungi dari kekerasan, dan berpartisipasi di dalam perekonomian.

Para mitra masyarakat sipil ini juga mengadvokasi dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh bukti, pembelajaran, dan pengalaman kelompok marginal didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang berdampak pada mereka.



'Aisyiyah adalah sebuah organisasi perempuan Islam di bawah Muhammadiyah yang berfokus untuk membantu perempuan mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan sosial kelompok marginal.

'Aisyiyah melibatkan masyarakat, pemerintah, tokoh agama, dan sekolah, untuk mengembangkan, mensosialisasikan, dan melaksanakan **undang-undang dan strategi nasional** untuk memberantas **kekerasan seksual, perkawinan anak dan *stunting*, inklusi disabilitas, serta mendukung anak muda dan lansia.**

Perempuan marginal diberdayakan melalui keanggotaan di kelompok akar rumput 'Aisyiyah yang bernama **Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA)**. Para anggota BSA memberikan layanan berbasis komunitas dan pendidikan tentang gizi dan *stunting*, perlindungan sosial, kekerasan berbasis gender, dan meningkatkan akses perempuan dan anak perempuan kepada layanan kesehatan seksual dan reproduksi serta sumber daya ekonomi.

Para relawan BSA menjangkau masyarakat untuk mensosialisasikan berbagai peraturan dan program pemerintah, mengadvokasi pengentasan kesenjangan dalam pelaksanaan layanan, membentuk kelompok ekonomi dan usaha, melatih petani perempuan, dan melibatkan laki-laki dalam berbagai program pendidikan keluarga.

INKLUSI mendukung 'Aisyiyah di **6 desa di Kabupaten Bojonegoro** dan **6 desa di Kabupaten Probolinggo** untuk menjalankan sejumlah inisiatif dan layanan inklusif di Jawa Timur:



Strategi Daerah untuk Pencegahan Perkawinan Anak di Jawa Timur dikembangkan dengan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, Mitra INKLUSI, dan jaringan masyarakat sipil.



Pelatihan Si Jaka Champion diberikan kepada para suami agar mendukung pemeriksaan kesehatan reproduksi para istri, mencegah *stunting*, dan perkawinan anak.



Rumah Gizi dibuat untuk menghasilkan sayur dan buah segar serta mendidik tentang gizi dan ASI eksklusif.



Bank Sampah adalah kelompok-kelompok ekonomi yang dibentuk untuk menghasilkan pendapatan dari daur ulang dan melindungi lingkungan.



Kelompok Wanita Tani (KWT) dibentuk untuk meningkatkan akses petani padi perempuan kepada subsidi pupuk di Desa Blado Kulon dan akses kepada pelatihan produksi pupuk anorganik dari dinas pertanian kabupaten.



Bina Usaha Ekonomi Keluarga 'Aisyiyah (BUEKA) dibentuk di Desa Blado Kulon dan memproduksi berbagai bumbu masak dan rempeyek kacang. Para anggota berpartisipasi di pelatihan *e-commerce* melalui kerja sama dengan Dinas Pariwisata/Kampus UNAIR, hingga mendapatkan izin usaha.



Seorang kader dari Pos Pengaduan di Desa Kesamben Kulon berbicara kepada anak-anak perempuan di Sekolah Perempuan untuk membangun kesadaran mereka akan hak mereka untuk terbebas dari kekerasan berbasis gender dan perkawinan anak.
Foto : KAPAL Perempuan

KAPAL Perempuan memberikan pendidikan dan pelatihan informal melalui inisiatifnya yang bernama **Sekolah Perempuan**. Para perempuan marginal diberdayakan dengan diberikan pengetahuan dan kapasitas untuk mengadvokasi hak mereka atas layanan serta untuk terbebas dari kekerasan dan perkawinan anak.

Mitra lokal **KPS2K** menjalankan Sekolah Perempuan di **4 desa di Kabupaten Gresik** dan **2 desa di Kabupaten Lumajang**. Layanan Pos Pengaduan di tingkat desa membantu perempuan untuk mengakses identitas hukum, perlindungan sosial, dan layanan kesehatan, serta menangani dan melakukan rujukan ketika terjadi kasus kekerasan dan perkawinan anak.

Perkawinan anak paksa digunakan oleh sebagian rumah tangga untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan utang. Kasus-kasus yang dibawa ke Pos Pengaduan dirujuk kepada **Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA)** untuk ditangani sesuai hukum yang berlaku. KPS2K mengadvokasi peraturan daerah untuk melaksanakan

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Tahun 2022 dan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA).

KPS2K membangun kepercayaan diri dan kapasitas perempuan secara individu dan kolektif, serta mengumpulkan dukungan agar mereka dapat berpartisipasi di dalam musyawaran perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa). Para anggota KPS2K-Sekolah Perempuan telah memperoleh dana desa untuk mengembangkan UMKM perempuan dan memperluas usaha ke pasar *e-commerce*.

KAPAL Perempuan juga mendukung berbagai desa untuk menjadi **Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)**, sebuah inisiatif bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan (Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak/KBP3A) dan Kementerian Desa. **Dua desa INKLUSI telah dipilih oleh KBP3A Kabupaten Gresik untuk menjadi pilot DRPPA.**

Lakpesdam PBNU – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Lakpesdam adalah sebuah lembaga di bawah organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) yang bekerja untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan toleran yang menjunjung hak asasi manusia dan pemberdayaan manusia.

Melalui INKLUSI, Lakpesdam dan para mitra lokalnya membangun kesadaran tentang dampak perkawinan anak dan bagaimana pencegahannya di Indonesia. Di **Kabupaten Malang**, Lakpesdam bekerja di **empat desa** melalui mitra lokalnya, **Fatayat Malang**.

Fatayat Malang berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan kunci tentang pendekatan kolaboratif untuk mendukung pelaksanaan **Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA)** serta sosialisasi dan implementasi **Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)** yang disahkan pada tahun 2022.

Fatayat Malang bekerja untuk memahami penyebab dan tren perkawinan anak di Kabupaten Malang, memperkuat pemantauan (*monitoring*) dan pencatatan kasus yang terdaftar maupun tidak terdaftar, memperbaiki pelaporan terkait target-target nasional, dan meningkatkan partisipasi perempuan di dalam proses pemerintahan desa dan kabupaten.

Lakpesdam mempromosikan pencegahan multi-pemangku kepentingan inklusif dan penanganan perkawinan anak di lima area kunci, yaitu:



Mendorong keterlibatan keluarga, guru, dan tokoh agama dalam upaya mencegah perkawinan anak melalui kegiatan pembangunan kesadaran dan kajian keagamaan terkait pencegahan perkawinan anak.



Memperkuat peran layanan dasar, khususnya posyandu remaja, layanan bimbingan untuk calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA), dan pencatatan kasus-kasus perkawinan anak di tingkat desa dengan memberdayakan kader-kader desa.



Meningkatkan akses korban perkawinan anak ke layanan perlindungan sosial dan intervensi kekerasan.



Mengadvokasi pengembangan kebijakan di tingkat desa dan kabupaten/kota untuk pencegahan perkawinan anak.



Mempromosikan model koordinasi yang bermakna dan berkelanjutan di antara para pemangku kepentingan yang relevan untuk pencegahan perkawinan anak, dari tingkat desa hingga kabupaten/kota.

Migrant CARE – Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat



Kelompok ekonomi DESBUMI di Desa Dukuhdempok menerima kunjungan dari Bupati Jember yang bertujuan memotivasi dan mendukung UKM-UKM yang dibentuk oleh para mantan pekerja migran perempuan.
Foto: Migrant CARE Jember

Migrant CARE mengadvokasi kebijakan dan peraturan internasional dan domestik untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia, mencegah perdagangan orang, dan menjamin akses ke perlindungan sosial.

Migrant CARE bekerja sama dengan pemerintah desa, dinas tenaga kerja (Disnaker), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan beberapa lembaga lainnya untuk memenuhi hak para pekerja migran melalui model layanan desa

terintegrasi. Program ini dikenal sebagai **DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran)**, dan **kelompok buruh migran DESBUMI** memberikan informasi dan layanan tentang migrasi yang aman dan legal, pelatihan pra-keberangkatan, dan penanganan kasus dan rujukan ketika terjadi pelanggaran hak dan perdagangan orang. Kelompok-kelompok DESBUMI mendampingi pemerintah desa untuk mengumpulkan data tentang pekerja migran dan menghubungkan mereka ke layanan perlindungan sosial, layanan kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Jawa Timur adalah daerah pengirim pekerja migran terbesar di Indonesia. INKLUSI mendukung **Migrant CARE Kabupaten Banyuwangi di 8 desa** dan **Migrant CARE Kabupaten Jember di 7 desa** untuk melaksanakan layanan DESBUMI, mengadvokasi peraturan desa untuk melindungi pekerja migran, dan membentuk kelompok usaha.

Migrant CARE mendukung **kelompok usaha perempuan yang terdiri dari para mantan pekerja migran** untuk mengembangkan pencaharian alternatif di Banyuwangi dan Jember dengan cara:



Mendampingi para anggotanya untuk memproduksi dan menjual produk-produk mereka, seperti kue, penganan, tas tenun, dan batik di desa masing-masing. Para perempuan ini kemudian memperluas akses pasar hingga ke luar desa mereka melalui pelatihan yang diberikan oleh platform *e-commerce* Tokopedia.



Membentuk koperasi untuk memperkuat keterampilan usaha dan ketahanan ekonomi perempuan. Menjadi anggota koperasi memperluas akses perempuan ke jaringan pasar, pembiayaan mikro, dan keahlian di bidang pemasaran, kualitas, dan pengembangan produk.



Meningkatkan partisipasi di musrenbang desa dengan dukungan dari pemerintah desa. Para anggota maupun mantan anggota DESBUMI mengadvokasi Dana Desa untuk mendukung kegiatan DESBUMI dan kelompok usaha perempuan dan koperasi para mantan pekerja migran.

PEKKA - Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga



Anggota Serikat Pekka Trenggalek mengikuti kelas Paradigta Academy, sebagai bagian dari program untuk memberdayakan perempuan kepala keluarga dan mempromosikan ekonomi berbasis sumber daya lokal.
Foto : PEKKA Trenggalek

PEKKA bekerja melalui **Serikat PEKKA Cabang Kabupaten Trenggalek** di **7 desa** untuk mengakses layanan dan sumber daya ekonomi untuk para perempuan kepala keluarga dan kelompok marginal lainnya.

Serikat PEKKA Trenggalek berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui pengorganisasian, pendidikan, dan pelatihan di **Akademi Paradigta PEKKA**.

Para siswa, termasuk perempuan disabilitas, belajar cara membentuk usaha dan koperasi di Trenggalek, yang memproduksi batik cetak ramah lingkungan dan panganan serta menjual produk-produk mereka di PEKKA Mart. Para perempuan lainnya bergabung dengan **Bank Sampah PEKKA**, sebuah layanan daur ulang, dengan bekerja sama dengan industri dan usaha lokal.

Seluruh anggota Serikat PEKKA di Trenggalek bekerja untuk mendukung partisipasi dan inklusi penyandang disabilitas di komunitas mereka. Mereka secara rutin mendampingi para anggota komunitas disabilitas ke dinas-dinas pemerintah untuk membantu mereka memproses KTP, kartu bantuan sosial, maupun kartu BPJS PBI.

Pelatihan-pelatihan di Akademi Paradigta membangun kepercayaan diri dan keterampilan para perempuan untuk **berpartisipasi di musrenbang desa**. Melalui representasi inklusif, perempuan kepala keluarga, termasuk perempuan disabilitas, memperoleh dana desa untuk mengatasi kesenjangan akses ke berbagai layanan dan program pemerintah, serta mendukung keberlanjutan unit usaha PEKKA.

PKBI – Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia



PKBI Jawa Timur bekerja sama dengan Forum Anak Jawa Timur untuk memberikan pemberdayaan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan keterampilan dan kepercayaan diri yang mereka butuhkan untuk menyuarakan aspirasi dan hak mereka melalui forum.
Foto : PKBI Jawa Timur

PKBI mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum untuk memenuhi hak mereka untuk mengakses kesehatan, pendidikan, dan layanan hukum, terbebas dari kekerasan, dan mendukung reintegrasi ke masyarakat.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Blitar melayani 30 kabupaten di Jawa Timur.

PKBI mengadvokasi dan bekerja sama dengan LPKA Kota Blitar dan juga penyedia layanan di komunitas untuk menjalankan inisiatif-inisiatif berikut:



Membentuk **Forum Keluarga** untuk para orang tua untuk mengakses informasi tentang anak-anak mereka, berpartisipasi di kelas *parenting*, dan mempersiapkan pembebasan anak mereka.



Memberikan **konseling psikologis** dan bimbingan untuk **mengelola kesehatan mental** dengan bekerja sama dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas).



Membentuk **Forum Anak** dengan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Timur, Forum Anak Provinsi dan sejumlah Kabupaten di Jawa Timur, serta Pemerintah Kota Blitar.



Mengembangkan **Panduan penanganan dan reintegrasi** anak dan anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) dengan bekerja sama dengan **Dinas Sosial Jawa Timur**.



Memberikan **pelatihan dan pendidikan keterampilan** melalui pemerintah, universitas, komunitas seni, dan para praktisi profesional.



Menandatangani **Nota Kesepahaman (MoU)** dengan BAPAS Kota Surabaya tentang penanganan kasus-kasus anak yang diproses di pengadilan sebelum ditempatkan di LPKA.



Temu Inklusi Nasional ke-5 dengan tajuk "Berdaya dalam Keberagaman Menuju Indonesia Inklusif Tahun 2030" yang dilaksanakan di Situbondo.
Foto: SIGAB

Mitra lokal SIGAB, **Yayasan Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS)**, melaksanakan Program **SOLIDER** di **6 desa** di **Kota Probolinggo** dan **8 desa** di **Kabupaten Situbondo** untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia untuk berpartisipasi dan berkonsultasi secara bermakna.

Untuk melaksanakan **Undang-Undang Penyandang Disabilitas** yang disahkan pada tahun 2016, PIONEER memimpin koordinasi dengan sejumlah pemerintah provinsi, jaringan disabilitas, Mitra INKLUSI, dan pemangku kepentingan kunci lainnya untuk mengembangkan **Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD)** di Jawa Timur.

PPDiS bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten untuk membentuk dan menjalankan **Unit Layanan Disabilitas (ULD)** untuk menghubungkan para penyandang disabilitas dengan pemberi kerja, pelatihan, dan peluang kerja.

Di tingkat desa, PPDiS membentuk **Kelompok Disabilitas Desa**. Para anggota bekerja dengan pemerintah desa dan penyedia layanan untuk memenuhi kriteria agar menjadi **Desa Inklusif**. Hal ini meliputi perbaikan akses kepada layanan pendidikan, perlindungan sosial, dan jaminan kesehatan nasional, dan juga layanan perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap penyandang disabilitas.

Desa Inklusif meningkatkan upaya untuk mendorong konsultasi dan keterwakilan (representasi) penyandang disabilitas di dalam perencanaan pemerintah, dengan bekerja sama dengan organisasi disabilitas untuk meningkatkan pengumpulan data, memberikan akomodasi layak dan aksesibilitas ke layanan pemerintah, dan bekerja untuk meningkatkan pemahaman dan interaksi dengan penyandang disabilitas psikososial.

NO-ONE IS LEFT BEHIND

Tidak Ada Satupun yang Tertinggal

Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat yang Inklusif, disingkat INKLUSI, berusaha untuk meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut. INKLUSI bekerja sama dengan pemerintah dan mitra-mitra masyarakat sipil untuk mendorong upaya memajukan kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. INKLUSI mendukung agenda pemerintah Indonesia dalam mencapai masyarakat yang inklusif dengan mendukung rencana Pembangunan Nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

INKLUSI merupakan program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang berlangsung selama 8 tahun (2021 - 2029) dengan anggaran hingga AUD 120 juta. Program ini bermitra dengan 11 organisasi masyarakat sipil Indonesia, 8 lembaga penelitian, dan jaringan mereka yang tersebar di 32 provinsi, 129 kabupaten, dan 650 desa di Indonesia.

